

**KANTOR REGIONAL XIV BKN**  
**LEMBAR PEREDARAN SURAT MASUK DAN KELUAR**

<b>NO AGD</b>	986	<b>TGL.:</b>	<b>M</b>	12/09/2023	RAHASIA SEGERA/MENDESAK PENTING RUTIN	
			<b>K</b>	18/09/2023		
<b>INDEKS</b>						
<b>ASAL :</b> BKN <b>NOMOR :</b> 333/HM-01/MO/ANU/2023 <b>TANGGAL :</b> <b>PERIHAL :</b> permohonan informasi					<b>DISPOSISI KAKANREG :</b>  Aratkan pimpinan dirpo kepada pak Matar, pak Hendro, pak laser, Kenangun	
<b>DILAMPIRKAN :</b>						
<b>DITERUSKAN KEPADA</b>  1. KABAG TATA USAHA 2. KABID MUTASI DAN STATUS KEPI GAWAIAN 3. KABID PENGANGKATAN DAN PENSIUN 4. KABID INFORMASI KEPEGAWAIAN 5. KABID PENGEMBANGAN DAN SUPERVISI KEPEGAWAIAN 6. JFT MADYA 7. KEPALA UPT BKN SORONG						



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman: bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

---

### **NOTA DINAS**

**NOMOR: 333/HM.01/ND/A.V/2023**

Yth. : Kepala Kantor Regional XIV Manokwari  
Dari : Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama  
Lampiran : 1 (satu) bundel dokumen permohonan informasi  
Hal : Permohonan Informasi

Sehubungan permohonan informasi publik dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat melalui PPID BKN melalui surat Nomor B-077/BPS/91550/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 terkait permintaan data belanja pegawai di lingkungan satuan kerja Kantor Regional XIV BKN Manokwari, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa badan publik dapat memberikan bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik kepada badan publik lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, permohonan informasi sebagaimana dimaksud untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Saudara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 September 2023

Plt. Kepala

Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama,

Disandatangani Secara Elektronik



Nur Hasan, S.Sos, M.Adm.SDA



Tembusan :

Kepala Biro Keuangan

---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





Nomor : B-077/BPS/91550/08/2023  
Lampiran : 1 set  
Perihal : *Permintaan Data Belanja Pegawai*

Manokwari, 14 Agustus 2023

Kepada Yth.

**PPID BKN RI**

di –

Tempat

Salah satu indikator ekonomi dasar pada suatu daerah ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator tersebut dapat menampilkan potret ekonomi keseluruhan pada suatu wilayah tertentu.

Institusi Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian daerah yang tercermin dalam PDRB. Struktur input institusi pemerintah memberi masukan penting yang dibutuhkan dalam mendukung penyusunan PDRB. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi mengenai Jumlah dan Balas Jasa Pegawai serta Biaya-Biaya dalam operasional Institusi Pemerintah. Untuk itu, kami memohon Bapak/Ibu Pimpinan dapat memberi data terkait. Adapun data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang yang berlaku. Data yang dimaksud dimohon untuk dapat kami terima pada **28 Agustus 2023** dengan mengirimkan ke email: [nerkon9100@bps.go.id](mailto:nerkon9100@bps.go.id). Jika ada yang perlu ditanyakan, dapat menghubungi Fitrah Sarah Ramadhani (085244506683).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Plt. Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Papua Barat,**



**LASMINI**





Lampiran Surat Nomor : 077/BPS/91550/08/2023

**Daftar Pegawai (PNS) dan Balas Jasa Pegawai  
Tahun 2021 dan 2022**

No	Nama Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jabatan dalam Instansi	2021			2022		
			Balas Jasa Pegawai (Rupiah)			Balas Jasa Pegawai (Rupiah)		
			Gaji Pokok	Tunjangan	Lain-Lain (Honorarium, Lembur, Uang Makan, dll)	Gaji Pokok	Tunjangan	Lain-Lain (Honorarium, Lembur, Uang Makan, dll)
1								
2								
3								
4								
5								
dst.								

**Keterangan :**

1. Yang dimaksud pegawai hanyalah pegawai Instansi yang berstatus PNS
2. Balas Jasa yang dicakup adalah Balas Jasa Kotor (Belum dipotong Pajak dan lainnya)

